

## Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju

**Kolonel Arm M. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si. M.Tr. (Han).**

Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Komando Pembinaan Doktrin,  
Pendidikan dan Latihan TNI AD (Wadanpussenarmed Kodiklatad,  
peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 59 Lemhannas RI

### Abstrak

Banyak ditemukan pemimpin yang melanggar etika moral dan agama, tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, mengabaikan penegakkan hukum, bahkan banyak pemimpin yang melakukan korupsi dan ditangkap KPK. *Indonesia Corruption Watch* mencatat bahwa dalam kurun waktu tahun 2004-2018, ada 104 kepala daerah yang berurusan dengan KPK karena kasus korupsi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua, karena sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 dunia, sulit rasanya mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu dan mau mengemban serta memperjuangkan amanah rakyat. Dari permasalahan di atas, tulisan ini membahas tentang penyiapan pemimpin tingkat strategis yang kredibel agar terwujud kepemimpinan nasional yang berwibawa.

**Kata kunci:** korupsi, pemimpin nasional, strategis, pemilu, parpol



ilustrasi: unsplash.com

## PENDAHULUAN

Perkembangan global, regional dan bahkan nasional ke depan, akan dilingkupi oleh kondisi yang semakin terbuka, semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*), tidak bisa diprediksi sebelumnya (*unpredictable*), serta akan diwarnai oleh kejadian-kejadian yang serba mendadak (*surprised*). Kondisi tersebut baik secara langsung maupun tidak akan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ke depan bangsa Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang diharapkan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi bangsa. Permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini seperti permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, tenaga kerja, berbagai potensi konflik SARA dan lain-lain, membutuhkan penanganan yang segera, karena apabila

salah dan lambat menanganinya, bukan tidak mungkin maka akan mengancam kepada eksistensi bangsa Indonesia itu sendiri.

Ironisnya ketika bangsa Indonesia sedang membutuhkan pemimpin yang mampu untuk memecahkan persoalan bangsa, namun justru masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya. Banyak ditemukan pemimpin yang melanggar etika moral dan agama, tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, mengabaikan penegakkan hukum, bahkan banyak pemimpin yang melakukan korupsi dan ditangkap KPK. Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa dalam kurun waktu tahun 2004-2018, ada 104 kepala daerah yang berurusan dengan KPK karena kasus korupsi.<sup>1</sup> Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua, karena sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 dunia, sulit rasanya

mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu dan mau mengemban serta memperjuangkan amanah rakyat.

Dari data dan fakta tersebut diatas, maka rumusan masalah yang diangkat, yakni : “Bagaimana menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis yang Kredibel guna mewujudkan Indonesia maju ?”.

## PEMBAHASAN

Menurut James Kouzes dan Barry Posner dalam bukunya, *Credibility* (1993), menjelaskan bahwa yang menjadi landasan dalam praktek kepemimpinan adalah kredibilitas.<sup>2</sup> Seorang pemimpin dikatakan kredibel apabila ia memiliki kualitas, kapabilitas, dan kekuatannya untuk menimbulkan kepercayaan orang lain. Kredibilitas seorang pemimpin sangatlah penting, karena orang mau mengikuti perintah pemimpinnya karena ia yakin dan percaya bahwa pemimpinnya mampu membawa organisasinya dengan baik. Melalui pemahaman terhadap teori tersebut, dan dikaitkan dengan permasalahan mendasar tentang kepemimpinan pada tingkat strategis saat ini, maka ada 3 (tiga) pokok-pokok pembahasan yang perlu diangkat dan kemudian untuk dicari solusi pemecahannya.

Pertama, proses kaderisasi pemimpin formal di tingkat strategis khususnya melalui jalur parpol belum baik. Menurut Nye, Jr, Joseph S, bahwa “tidak mungkin seorang dapat memimpin tanpa kekuasaan”. Penjelasan Nye tersebut dapat dipahami bahwa untuk menjadi pemimpin seseorang harus memiliki kekuasaan. Salah satu jalan untuk berkuasa adalah melalui partai politik, dimana warga negara

Indonesia yang ingin menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, kepala/wakil kepala daerah maupun presiden/wakil presiden, maka harus melalui seleksi kaderisasi dalam suatu partai politik secara demokratis. Sejalan dengan perkembangan kehidupan politik di Indonesia saat ini, peran dan fungsi kaderisasi parpol tersebut belum secara optimal dilaksanakan, sebagai contoh saat ini banyak parpol yang memajukan calon legislatif (caleg) dari public figure (artis). Padahal sebagian besar dari public figure (artis) tersebut tidak memiliki background, kapasitas maupun kapabilitas dalam dunia politik di Indonesia.

Fenomena seperti ini terjadi karena pragmatisme dari partai politik dengan tujuan untuk mendulang suara pada pesta demokrasi yang akan datang, popularitas artis menjadi sebuah modal yang kuat untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya di tengah masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam memilih wakil mereka. Selain itu masih banyaknya partai politik yang mengajukan mantan napi koruptor menjadi caleg juga merupakan indikasi masih belum optimalnya kaderisasi Parpol. Padahal KPU sendiri telah mengeluarkan peraturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.<sup>3</sup> Namun, peraturan tersebut seperti dianggap hanya “angin lalu” oleh sebagian besar parpol. Hal ini seolah memberikan kesan kepada masyarakat bahwa calon pemimpin bangsa ini hanya itu-itu saja, partai politik seperti kehabisan stok calon pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab, akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik dan calon pemimpin khususnya

semakin menurun. Fenomena seperti diuraikan diatas tidak akan terjadi jika saja partai politik sudah menjalankan proses kaderisasi secara demokratis guna menyiapkan pemimpin tingkat strategis yang memiliki kredibilitas dan integritas untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Kedua, pemimpin yang berasal dari kalangan informal belum diberdayakan secara optimal. Beda halnya dengan pemimpin formal, pemimpin informal ia diakui sebagai pemimpin disebabkan karena memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, sehingga mampu mempengaruhi perilaku maupun psikis masyarakat.<sup>4</sup> Ulama/tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan kepala suku, adalah merupakan pemimpin informal. Pemimpin ini peranannya pada wilayah yang tak terbatas dengan memiliki daerah yang luas atas pengaruhnya, baik di sekitar tempat tinggalnya dimana ia berada atau bahkan diluar daerahnya. Hal ini mencerminkan bahwa kepemimpinan informal dapat dijadikan sebagai tolok ukur dari perkembangan suatu masyarakat yaitu ikut berperan dalam perkembangan sosial budaya masyarakat dan turut mewarnai sejarah. Sebagai contoh pemimpin informal di Indonesia yang turut berjuang dalam merebut kemerdekaan antara lain Pangeran Diponegoro dari tokoh agama, Sultan Hasanuddin dari kalangan bangsawan, sementara dari kalangan pendidikan ada Ki Hajar Dewantoro. Di dunia internasional kita mengenal sosok Mahatma Gandhi maupun Nelson Mandela yang merupakan pemimpin spiritual serta aktivis yang memperjuangkan hak-hak warga negaranya. Namun dewasa

ini pemberdayaan pemimpin informal di Indonesia masih belum optimal. Peran aktif mereka dalam menyukseskan pembangunan baik sebagai perencana, penggerak masyarakat dan solusi permasalahan kurang mendapat tempat. Padahal kenyataannya para pemimpin informal ini termasuk agen perubahan (*agent of change*)<sup>5</sup>, walaupun hanya dapat dikatakan pada ruang lingkup atau tingkat desa/kelurahan, namun memiliki pengaruh yang dapat membawa kemajuan yang sangat besar. Oleh sebab itu, potensi seperti inilah yang perlu diperhatikan untuk mengintegrasikan ke dalam program-program pemerintah sehingga keberadaannya lebih potensial untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju.

Ketiga, masyarakat belum mampu memilih pemimpin tingkat strategis yang benar-benar dibutuhkan bangsa saat ini. Ada semacam pameo yang berkembang di masyarakat saat ini, yang menunjukkan semakin menurunnya tingkat kepercayaan kepada pemimpin, yaitu masyarakat berpandangan bahwa siapapun yang terpilih menjadi pemimpin hasilnya akan sama saja, tidak ada yang mengutamakan kepentingan rakyat. Padahal di era globalisasi saat ini, masyarakat dituntut untuk mampu memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan. Pameo yang berkembang seolah sudah mempengaruhi pikiran mereka, sebagian besar masyarakat cenderung untuk bersikap acuh dan tidak peduli (apatis) terhadap calon pemimpin bangsa kedepan. Hal ini terlihat pada pelaksanaan pemilu, dimana sebagian masyarakat lebih mengutamakan

pragmatisme dan mengabaikan rasionalitas. Masyarakat cenderung untuk memilih pemimpin berdasarkan kalkulasi untung rugi yang mereka terima serta tingkat popularitas calon pemimpin bukan berdasarkan idealisme atau visi misi yang di tawarkan oleh calon pemimpin<sup>6</sup>. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan, preferensi dan literasi politik masyarakat. Selain itu masih banyaknya partai politik yang melakukan kecurangan seperti *money politics*, politik transaksional serta pengaruh dari media sosial juga menjadi penyebab masyarakat belum mampu memilih pemimpin yang benar-benar di butuhkan bangsa saat ini.

Menyiapkan pemimpin tingkat strategis yang kredibel. Era globalisasi yang semakin kompleks menuntut hadirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki kredibilitas dan integritas untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional (*national interest*) di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu diperlukan upaya antara lain; pertama, reformasi sistem kaderisasi pemimpin. Proses rekrutmen calon pemimpin melalui lembaga formal (parpol) harus dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Para pimpinan parpol harus mengutamakan rekam jejak (*track record*) para kadernya, sehingga dapat terlahir pemimpin yang kredibel, berpengalaman dan benar-benar memahami persoalan bangsa, bukan pemimpin instan yang hanya bermodal popularitas; kedua, deregulasi peraturan tentang partai politik dengan menambahkan kurikulum pendidikan politik

*Seorang pemimpin dikatakan kredibel apabila ia memiliki kualitas, kapabilitas, dan kekuatannya untuk menimbulkan kepercayaan orang lain.*

dalam setiap rekrutmen calon pemimpin. Untuk membentuk karakter pemimpin diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan yang tepat sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kredibilitas untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia; ketiga, peran aktif pemerintah dan partai politik untuk memberikan sosialisasi tentang literasi politik bagi masyarakat. Pendidikan politik harus dilaksanakan di semua jenjang lapisan masyarakat dimulai sejak dini secara berkesinambungan dan berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemilu saja, sehingga masyarakat menjadi tidak buta politik, tidak mudah terpengaruh karena sudah memiliki preferensi yang jelas tentang pemimpin yang akan dipilihnya. Selain itu pendidikan politik juga akan melahirkan calon-calon politikus yang benar-benar memahami kepentingan nasional bukan hanya kepentingan partainya; keempat, pemerintah harus berfikir *out of the box*, dengan menyiapkan pemimpin dari jalur informal baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Melalui upaya-upaya inilah diharapkan nantinya akan hadir pemimpin yang kredibel dan berintegritas baik yang berasal dari pemimpin formal, maupun

## *Pemimpin informal harus dapat diberdayakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat.*

informal (eksekutif, legislatif, yudikatif, *privat sector*, dan masyarakat lainnya). Pemerintah harus bisa menempatkan/mendudukan pemimpin informal yang sejajar dengan pemimpin formal, sehingga keberadaannya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat yang mendukungnya; kelima, peran aktif masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan memiliki kredibilitas serta bersih dari permasalahan hukum. Masyarakat harus peduli dan mau tahu tentang siapa calon-calon pemimpinnya, serta apa visi dan visinya, sehingga tidak akan salah pilih dan akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar memenuhi harapan masyarakat. Pemimpin informal harus dapat diberdayakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Perkembangan dunia yang semakin kompleks melahirkan berbagai permasalahan bangsa, hal ini menuntut kehadiran pemimpin yang memiliki kredibilitas untuk dapat menghadapi segala permasalahan tersebut. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin saat ini, sangat ironis jika dihadapkan kepada tuntutan tersebut,

sehingga perlu adanya upaya menyiapkan pemimpin yang kredibel melalui reformasi sistem kaderisasi, deregulasi peraturan tentang parpol, peran aktif pemerintah dan parpol dalam sosialisasi literasi politik bagi masyarakat, penyiapan pemimpin melalui jalur Informal serta peran aktif masyarakat dalam memilih pemimpin.

#### **Saran**

1. Kaderisasi calon pemimpin dari jalur formal, seperti kader calon presiden/wakil presiden, legislatif, eksekutif, yudikatif, kepala/wakil kepala daerah, DPR, DPD dan DPRD, perlu diberlakukan persyaratan khusus, dimana calon harus memiliki kapasitas, kapabilitas, serta track record yang baik dan bersih serta tidak bermasalah dengan hukum;
2. Siapapun yang memiliki potensi sebagai pemimpin informal, harus didukung dan diberdayakan untuk terlibat dalam penyelesaian berbagai permasalahan bangsa dan diberi kesempatan untuk memberikan sumbangsuhnya dalam pembangunan nasional;
3. Bagi masyarakat secara umum perlu diberikan pendidikan politik dan karakter kepemimpinan dimulai sejak dini, dengan harapan akan lahir calon-calon pemimpin informal yang kredibel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahidin, dkk, “Pemimpin Informal dan Dinamika Sosial: (Studi Kasus Lima tokoh Di Desa Allu Taroawang Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto)” KOMUNIDA : MEDIA KOMUNIKASI DAN DAKWAH, 7(2), 169-182. Diunduh dari <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/komunida/article/view/478>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Kominfo : Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang”. Diakses dari [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Intern%20IN-et+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Intern%20IN-et+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker)
- Mohd. Riswan Bin Jamal, “Cerdas Memilih Pemimpin Menuju Pemilu 2019”, diakses dari <https://identitasunhas.com/cerdas-memilih-pemimpin-menuju-pemilu-2019/>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kota

## Endnotes

- 1 <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-2004-2018-104-kepala-daerah-tersandung-korupsi-palin-banyak-di-jawa-timur,html>
- 2 <https://kolom.kontan.co.id/news/920/kredibilitas-pemimpin>
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kota
- 4 <https://www.ismasaparni.com/2015/09/kepemimpinan-formal-dan-informal.html>
- 5 Abd. Wahidin, dkk, “Pemimpin Informal dan Dinamika Sosial: (Studi Kasus Lima tokoh Di Desa Allu Taroawang Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto)” KOMUNIDA : MEDIA KOMUNIKASI DAN DAKWAH, 7(2), 169-182. Retrieved from <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/komunida/article/view/478>
- 6 <https://identitasunhas.com/cerdas-memilih-pemimpin-menuju-pemilu-2019/>